

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian desa dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada, menyediakan layanan publik, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Muhammad et al., 2022).

Keberadaan BUMDes dianggap mampu membantu mengurangi angka pengangguran serta menekan tingkat migrasi penduduk desa ke kota. Dari sisi keuangan, indikator seperti peningkatan penjualan, pertumbuhan modal, dan kinerja BUMDes di Provinsi Bali menunjukkan hasil yang positif Sinarwati & Prayudi (2021). Hal ini menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Selain itu, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan BUMDes melalui penerbitan regulasi seperti Undang-Undang dan Peraturan Menteri Desa, serta dukungan berupa bantuan modal dan program pendampingan.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Hingga September 2024, dari sekitar 66.000 BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia, 75,8% diantaranya tercatat aktif, sementara 24,2% lainnya belum beroperasi secara

optimal (News, 2024). Meskipun jumlah BUMDes terus bertambah, efektivitasnya dalam meningkatkan perekonomian desa masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, sejak pembentukannya pada tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 127 BUMDes yang tersebar di sembilan kecamatan di wilayah ini (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025). Pendirian BUMDes ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendorong setiap desa untuk membentuk BUMDes guna mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng masih menghadapi tantangan. Data per 9 September 2024 menunjukkan bahwa dari 127 BUMDes yang tersebar di Kabupaten Buleleng, 118 BUMDes telah berbadan hukum, sementara 8 lainnya sedang dalam proses pengajuan, dan 1 BUMDes dinyatakan mati suri akibat pengelolaan yang tidak optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan kurangnya pemahaman mengenai potensi desa yang dapat dikembangkan (NusaBali.com, 2024).

Tabel 1.1 Progres Pendaftaran BUMDes Berbadan Hukum Di Kabupaten Buleleng (S/D 9 September Tahun 2024)

No	Kecamatan	Jumlah Unit BUMDes	Sudah Berbadan Hukum	Proses Pengajuan Badan Hukum	Mati Suri
1.	Gerokgak	13	11	2	-
2.	Seririt	20	17	3	-
3.	Busungbiu	14	12	1	1
4.	Banjar	17	16	1	-
5.	Sukasada	14	14	-	-
6.	Buleleng	12	12	-	-
7.	Sawan	14	14	-	-

No	Kecamatan	Jumlah Unit BUMDes	Sudah Berbadan Hukum	Proses Pengajuan Badan Hukum	Mati Suri
8.	Kubutambahan	13	13	-	-
9.	Tejakula	10	9	1	-
Total		127	118	8	1
Total BUMDes			127		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penerapan standar laporan keuangan di tingkat BUMDes, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan dan pengelolaan usaha BUMDes secara transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian oleh Susilo et al., (2020) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha BUMDes, di mana laporan yang akurat dan sesuai standar akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan peluang BUMDes untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dari 9 kecamatan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Seririt mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenis usaha yang dikelola. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 20 unit BUMDes yang tersebar di wilayah ini, 17 BUMDes telah berbadan hukum, sementara 3 lainnya sedang dalam proses pengajuan (DPMD, 2025)

Tabel 1.2 Progres Pendaftaran BumDes Berbadan Hukum Di Kecamatan Seririt (S/D 9 September Tahun 2024)

No.	Desa	Status Badan Hukum
1.	Unggahan	Sudah Berbadan Hukum
2.	Ularan	Proses Pengajuan badan hukum
3.	Ringdikit	Sudah Berbadan Hukum
4.	Rangdu	Sudah Berbadan Hukum
5.	Mayong	Sudah Berbadan Hukum
6.	Gunungsari	Sudah Berbadan Hukum
7.	Munduk Bestala	Sudah Berbadan Hukum
8.	Bestala	Sudah Berbadan Hukum
9.	Kalianget	Sudah Berbadan Hukum
10.	Joanyar	Sudah Berbadan Hukum

No.	Desa	Status Badan Hukum
11.	Tangguwisia	Sudah Berbadan Hukum
12.	Sulanyah	Sudah Berbadan Hukum
13.	Bubunan	Sudah Berbadan Hukum
14.	Patemon	Proses Pengajuan badan hukum
15.	Pengastulan	Sudah Berbadan Hukum
16.	Lokapaksa	Sudah Berbadan Hukum
17.	Pangkungparuk	Sudah Berbadan Hukum
18.	Banjarasem	Sudah Berbadan Hukum
19.	Kalisada	Proses Pengajuan badan hukum
20.	Umeanyar	Sudah Berbadan Hukum

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2025

Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Seririt terkendala latar belakang pendidikan pengelola yang beragam, terutama minimnya pendidikan di bidang keuangan, sehingga memengaruhi kualitas laporan. Cahyani & Atmadja (2023) menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan akuntansi di kalangan pengurus menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyusunan laporan. Santoso et al., (2022) juga menegaskan bahwa keberlanjutan BUMDes bergantung pada kemampuan pengelola dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes masih meninggalkan berbagai persoalan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM yang dipekerjakan di BUMDes. Kualitas SDM yang rendah tentunya menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak dapat dipercaya (*not accountable*), sehingga dapat menghambat perkembangan BUMDes (Julianto et al, 2024). Sinarwati et al, (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi BUMDes melalui analisis kelayakan bisnis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, Sinarwati & Widiastini (2024) menyoroti bahwa literasi keuangan berperan penting dalam keputusan investasi dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Berlandaskan impak observasi awal, periset mendapatkan keterangan masih minimnya pemahaman pengelola BUMDes tentang Sistem Pengendalian Internal

(SPI), keterbatasan SDM kompeten, kurangnya pengawasan, serta kendala anggaran memperburuk kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt berdasarkan keterangan . Menurut Putri (2022) BUMDes dengan SPI yang efektif menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal. Menurut keterangan dari kecamatan Seririt, SPI BUMDes di Kecamatan Seririt masih lemah karena pengawas sering diangkat hanya untuk memenuhi syarat administratif akibat minimnya minat dan rendahnya gaji, seiring dengan kondisi BUMDes yang masih berkembang. Kasus dugaan penggelapan dana di BUMDes Desa Kalianget (Gatra Bali, 2025) dan manipulasi laporan keuangan di Desa Banjarasem (Detik Bali, 2025) menunjukkan lemahnya pengawasan. Akibatnya, laporan keuangan sering tidak balance dan perlu diperbaiki berulang, mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi serta menurunkan transparansi dan efektivitas SPI di BUMDes Kecamatan Seririt.

Keterbatasan akses terhadap pelatihan akuntansi turut memperburuk kondisi BUMDes di Kecamatan Seririt. Hingga kini, pemerintah belum mengadakan pelatihan akuntansi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pengelola BUMDes (DPMD, 2025). Pelatihan umumnya diinisiasi mandiri oleh BUMDes dengan anggaran internal yang terbatas, sehingga tidak merata dari segi frekuensi maupun kualitas materi. Akibatnya, pegawai tanpa latar belakang akuntansi tetap kesulitan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan (Sinarwati., & Widiastini, 2024)

Dalam konteks ini, Menurut Suwardjono (2016) kualitas laporan keuangan ditentukan oleh karakteristik seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kejelasan agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sesuai Keputusan

Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022, laporan keuangan BUMDes minimal harus mencakup jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (PDTT, 2022). Penerapan standar ini belum konsisten, didukung dengan keterangan dari Kecamatan Seririt yaitu dari 20 BUMDes yang ada, hanya BUMDes Giri Artha Mandara yang telah menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sesuai ketentuan, sementara BUMDes lainnya masih menunjukkan format pelaporan yang beragam. Seperti, BUMDes Lumbung Taman Sari hanya mencakup neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca; BUMDes Mandiri Bersama Gsm mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas; BUMDes Canang Sari menyusun buku besar, laporan laba rugi, dan neraca; BUMDes Srikandi Mandara mencakup buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, dan neraca lajur; sedangkan BUMDes Banjar Asem Mandara menyusun laporan yang lebih lengkap, yakni jurnal umum, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas; BUMDes Artha Nadi mencakup laporan laba rugi, neraca saldo dan neraca. variasi dalam bentuk dan kelengkapan laporan keuangan ini diakui oleh pihak kecamatan Seririt. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di wilayah ini masih memerlukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Kecamatan Seririt mengungkapkan bahwa masih banyak BUMDes mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang *balance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman teknis pengelola terhadap sistem pencatatan akuntansi, yang berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, ketidakseimbangan (*unbalance*) dalam laporan keuangan secara

langsung mencerminkan lemahnya karakteristik keandalan dalam kualitas laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang bervariasi dan tidak sesuai standar mencerminkan karakteristik keterbandingan dalam konteks antarentitas. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Julianto et al., (2024) yang menyatakan bahwa belum adanya pemahaman para pengelola BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Permendes No. 136 Tahun 2022 berdampak pada terjadinya asimetri informasi terkait keuangan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMDes melalui pelatihan yang lebih intensif serta optimalisasi peran pendamping desa untuk memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMDes melalui pelatihan yang lebih intensif serta optimalisasi peran pendamping desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, salah satu tugas utama pendamping desa adalah memberikan bimbingan teknis dalam tata kelola keuangan desa, termasuk pengelolaan keuangan BUMDes (PDDT, 2022). Oleh karena itu, penguatan peran pendamping desa di Kecamatan Seririt menjadi hal yang krusial dalam memastikan tata kelola keuangan BUMDes berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu mendukung keberlanjutan usaha BUMDes secara optimal.

Teori Kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu sistem pengelolaan keuangan yang berlaku universal, melainkan efektivitasnya tergantung pada kesesuaian antara faktor internal dan eksternal organisasi (Donaldson, 2001). Dalam konteks BUMDes di Kecamatan Seririt, faktor internal seperti latar belakang

pendidikan, SPI, dan pelatihan akuntansi sangat menentukan kualitas laporan keuangan. Namun, banyak pengelola BUMDes tidak memiliki latar belakang akuntansi dan jarang mengikuti pelatihan formal, menyebabkan laporan keuangan tidak sesuai standar dan sering kali tidak *balance*. Selain itu, pengawasan SPI lemah karena banyak pengawas diangkat hanya demi syarat administratif, bukan karena kompetensi. Hal ini terbukti dari kasus penggelapan dana di BUMDes Desa Kalianget dan manipulasi laporan keuangan di Desa Banjarasem, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan tata kelola.

Secara eksternal, regulasi seperti Permendes No. 2 Tahun 2024 menuntut laporan keuangan yang akuntabel dan siap menghadapi pengelolaan dana ketahanan pangan (Kemendes PDPT, 2024). Dari 20 BUMDes di Kecamatan Seririt, hanya satu yang menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar Kepmen 136/2022, sementara sebagian besar lainnya masih mengalami masalah seperti ketidakseimbangan dalam laporan keuangan dan lemahnya penerapan SPI. Ketidaksesuaian antara kapasitas internal dan tekanan eksternal ini memperkuat peran teori kontingensi sebagai dasar dalam memahami rendahnya kualitas laporan keuangan BUMDes di Seririt.

Kecamatan Seririt dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Buleleng. Menurut Cahyani & Atmadja (2023) semakin banyak unit usaha, semakin besar potensi variasi kualitas laporan keuangan akibat perbedaan tingkat pendidikan, efektivitas SPI, dan kualitas pelatihan. Hasil observasi menunjukkan variasi signifikan dalam penerapan standar laporan keuangan, didukung dengan keterangan dari kecamatan Seririt dimana hanya BUMDes Giri Artha Mandara yang telah menyusun laporan keuangan

lengkap sesuai Kepmen 136 Tahun 2022. Sementara itu, BUMDes lainnya menyusun laporan keuangan dengan format yang berbeda-beda, baik dari sisi kelengkapan maupun komponen yang disusun. Hal ini menjadikannya lokasi ideal untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes.

Pendirian BUMDes diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendorong pembentukan BUMDes untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan desa. Sebagai entitas ekonomi, BUMDes wajib menyusun laporan keuangan yang akurat dan andal sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan (PD TT, 2022). Kualitas laporan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk latar belakang pendidikan pengelola. Cahyani & Atmadja (2023) menyatakan bahwa pengelola dengan latar belakang ekonomi atau akuntansi lebih cepat memahami penyusunan laporan sesuai SAK ETAP. Sinarwati & Widiastini (2024) juga menambahkan bahwa literasi keuangan, *overconfidence*, dan *herding* bias mempengaruhi keputusan investasi yang relevan dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Pengelola BUMDes dengan latar belakang non-ekonomi cenderung lebih lambat memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai standar (Cahyani & Atmadja, 2023). Aliah et al., (2022) juga menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana pendidikan yang relevan meningkatkan pemahaman dan akurasi pelaporan. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa pengelola BUMDes harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang berkualitas penting untuk memastikan pengelolaan keuangan BUMDes transparan dan akuntabel. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), yaitu kebijakan dan prosedur untuk menjamin efektivitas operasional, keandalan laporan, dan kepatuhan regulasi (COSO, 2013). Penerapan SPI yang baik dapat mencegah kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan dana. SPI yang efektif berdampak positif pada penyaluran kredit LPD, yang menunjukkan relevansinya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes (Suarmanayasa, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan Wahyuni & Sari (2020), yang menyatakan bahwa penguatan SPI meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan BUMDes. Namun, observasi di Kecamatan Seririt menunjukkan tantangan dalam penerapan SPI, seperti kesulitan mencari pengawas dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan minimnya insentif bagi pengawas, mengingat BUMDes masih dalam tahap berkembang. Adiputra et al., (2020) menambahkan bahwa ketidaksesuaian sistem pengendalian dengan budaya organisasi berdampak negatif pada kinerja BUMDes. Selain itu, Sinarwati et al., (2023) juga menekankan pentingnya pengawas yang kompeten untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kecurangan.

Dari segi regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes mengamanatkan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Indonesia, 2021). Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang mengharuskan setiap BUMDes menerapkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik (RI, 2010). Namun, keterbatasan SDM

dan rendahnya insentif menjadi hambatan di lapangan. Pelatihan akuntansi menjadi solusi penting, karena terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes (Cahyani, 2023).

Pelatihan akuntansi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun laporan sesuai standar. Aliah et al. (2022) menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan membutuhkan pemahaman prinsip akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa pengelola BUMDes harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan usaha. Sinarwati & Widiastini, (2024) menekankan bahwa efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh relevansi materi, sementara Suartana (2021) menyebut pelatihan berbasis praktik lebih efektif dari metode teori.

Penelitian mengenai pengaruh latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal (SPI), dan pelatihan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan hasil yang beragam. Cahyani & Atmadja (2023) dan Rahmadani et al. (2022) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Nurani (2023) dan Poetri (2021) juga menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) juga menunjukkan hasil yang beragam. Cahyani & Atmadja (2023) dan Firmansyah & Sinambela (2020) juga mengidentifikasi bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, Wibisono, D., & Basuki, (2022)

dan Handayani (2023) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Demikian pula, pengaruh pelatihan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan juga memberikan hasil yang beragam. Cahyani & Atmadja, (2023) dan Risnawati et al (2023) juga mengidentifikasi bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil yang bertolak belakang ditemukan oleh Wibisono & Basuki (2022) dan Purwanti & Mustofa (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Dari perbedaan hasil penelitian tersebut, penulis ingin meneliti kembali bagaimana kondisi saat ini pada BUMDes di Kecamatan Seririt. Ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya memunculkan *gap* penelitian yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami apakah faktor latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal, dan pelatihan akuntansi masih memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes dalam konteks yang lebih terkini dan spesifik.

Penelitian ini merujuk dari penelitian Cahyani & Atmadja (2023). Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes, sedangkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang bervariasi tergantung pada relevansi bidang studi dengan pengelolaan keuangan.

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya dengan tetap menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Pelatihan, namun dengan penyesuaian. Variabel Tingkat Pendidikan diganti menjadi Latar Belakang Pendidikan karena

studi seperti yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2022), menunjukkan bahwa pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi lebih relevan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, variabel Pelatihan dipertegas menjadi Pelatihan Akuntansi untuk menekankan peningkatan kompetensi teknis pengelola. Pelatihan spesifik ini terbukti lebih efektif dibanding pelatihan umum (Risnawati, Sumadi, Wati 2023).

Selain pengembangan variabel, Pemilihan Kecamatan Seririt sebagai lokasi penelitian dibandingkan cakupan sebelumnya di seluruh Kabupaten Buleleng didasarkan pada pertimbangan metodologis yang tetap sejalan dengan pendekatan kuantitatif dan metode purposive sampling (Sugiyono, 2021). Meskipun penelitian kuantitatif umumnya menggunakan sampel dalam jumlah besar, penelitian ini lebih mengutamakan kualitas data dan relevansi temuan daripada sekadar memperbanyak sampel (Ghozali, 2021). Beberapa kasus, seperti dugaan penggelapan dana di Desa Kalianget dan manipulasi laporan keuangan di Desa Banjarasem, menunjukkan kelemahan pengendalian internal dan transparansi BUMDes (G. Bali, 2025; Detik Bali, 2025). Ratmasari, Yuliani, & Hakim (2021) menyatakan bahwa kelemahan ini meningkatkan risiko penyimpangan laporan keuangan.

Kasus di Kecamatan Seririt dan Permendes No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan menjadikan analisis kualitas laporan keuangan BUMDes di wilayah ini penting. Meskipun penelitian kuantitatif cenderung memakai sampel besar, purposive sampling dipilih karena menekankan kualitas data (Sugiyono, 2021). Kecamatan Seririt dipilih karena memiliki jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Buleleng, memungkinkan variasi karakteristik penyusunan laporan keuangan yang lebih luas. Creswell.,

(2018) menyatakan bahwa cakupan penelitian yang lebih spesifik tetap valid asalkan sampel mewakili populasi. Pendekatan ini juga mendukung analisis yang lebih mendalam serta menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengelolaan keuangan BUMDes (Iriyanti & Munandar, 2023; Zulkarnain & Dewi, 2022).

Penelitian ini menggunakan uji parsial untuk melihat pengaruh spesifik tiap variabel terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Seririt. Ghazali (2021) menyatakan bahwa uji simultan hanya menunjukkan pengaruh keseluruhan, bukan kontribusi masing-masing variabel. Gujarati & Porter (2020) menilai uji parsial lebih efektif mengidentifikasi faktor dominan, terutama pada kondisi BUMDes yang beragam. Wahyuni, L., & Sari (2020) menyebutkan bahwa dalam organisasi dengan karakteristik berbeda, pendekatan parsial lebih akurat dibandingkan uji simultan yang menggabungkan seluruh variabel. Oleh karena itu, uji parsial lebih optimal dalam mengevaluasi tiap faktor secara mendetail tanpa kehilangan konteks spesifik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul yang diangkat dalam penelitian ini, “PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PELATIHAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI KECAMATAN SERIRIT”. Penelitian ini diharapkan membuktikan bahwa latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal, dan pelatihan akuntansi berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan

rekomendasi bagi dan pengelola BUMDes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang riset diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan pengelola BUMDes di Seririt memengaruhi kualitas laporan keuangan. Banyak pengelola berlatar belakang non-akuntansi, sehingga pemahaman akuntansi dan tata kelola masih terbatas. Cahyani & Atmadja (2023) menyebut pengelola dengan pendidikan relevan lebih mampu menyusun laporan sesuai standar. Ketidaksesuaian pendidikan menyulitkan pencatatan transaksi dan menghambat akuntabilitas. Selain itu, menurut Rahmadani et al. (2022), Pendidikan yang sesuai meningkatkan pemahaman pengelola dalam menerapkan pengendalian internal dan sistem pelaporan yang efektif. Namun, di Kecamatan Seririt, perbedaan latar belakang pendidikan menyebabkan variasi kualitas laporan keuangan, di mana sebagian BUMDes mampu menyusunnya dengan baik, sementara lainnya masih kesulitan mencapai keseimbangan laporan. Oleh karena itu, pelatihan akuntansi yang relevan menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan akibat latar belakang pendidikan yang tidak sesuai (Siregar, 2021).
2. Hasil observasi menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Internal (SPI) di BUMDes Kecamatan Seririt sudah diterapkan namun belum optimal, menyebabkan ketidakseimbangan laporan keuangan dan tingginya risiko kesalahan pencatatan. Minimnya pemahaman pengelola terhadap prinsip SPI, khususnya bagi yang tidak berlatar belakang akuntansi menjadi faktor utama.

Selain itu, keterbatasan SDM dan lemahnya pengawasan memperburuk kondisi. Menurut Putri (2022) menyatakan bahwa SPI yang efektif menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Namun, di Seririt, banyak pengawas hanya diangkat secara administratif, bukan karena kompetensi, sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal. Kasus penggelapan dana di Desa Kalianget (Gatra Bali, 2025). dan manipulasi laporan di Desa Banjarasem (Detik Bali, 2025). Hal ini mencerminkan lemahnya SPI. Hal ini menegaskan bahwa lemahnya pengendalian internal menghambat transparansi laporan. Dengan adanya Permendes No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan, tantangan pengelolaan semakin berat. Pengelola harus memastikan dana tercatat dan digunakan sesuai ketentuan (Adiputra et al., 2020). Karena tanpa SPI yang kuat, risiko penyalahgunaan meningkat (Dewi & Putra 2022). Maka, penguatan SPI, peningkatan pemahaman, dan dukungan anggaran menjadi krusial (Sinarwati et al., 2023).

3. Pelatihan akuntansi bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Seririt masih belum optimal dalam frekuensi, kualitas materi, dan keterjangkauan. Hingga kini, pemerintah belum menyediakan pelatihan terstruktur, sehingga BUMDes harus menginisiasi sendiri dengan anggaran terbatas. Akibatnya, pelatihan sering kali kurang spesifik dan tidak mendalam dalam meningkatkan keterampilan akuntansi pengelola. Menurut Risnawati, Sumadi, Wati (2023) pelatihan akuntansi yang komprehensif meningkatkan pemahaman pengelola dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Namun, keterbatasan anggaran di Kecamatan Seririt membuat pelatihan tidak rutin dan bervariasi kualitasnya, sehingga kemampuan pengelola dalam mengelola keuangan berbeda-beda.

Akibatnya, laporan keuangan sering tidak *balance* dan memerlukan perbaikan berulang. Cahyani & Atmadja (2023) Kurangnya pelatihan akuntansi praktis menyulitkan pengelola dalam menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten. Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang relevan agar laporan keuangan BUMDes akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt masih terkendala keterbatasan pemahaman pengelola, minimnya pelatihan akuntansi, dan belum optimalnya sistem pengendalian internal. Sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022, laporan keuangan harus andal, relevan, dan terbanding. Namun, observasi menunjukkan banyak BUMDes belum mampu menyusun laporan sesuai standar, menyebabkan ketidakseimbangan dan perbaikan berulang dan pada setiap BUMDes menunjukkan variasi dalam penyusunan laporan keuangan. Cahyani & Atmadja (2023) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pengelola, pelatihan akuntansi, dan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang siklus akuntansi dan pencatatan yang benar mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan BUMDes secara akurat (Risnawati et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt memerlukan penguatan kompetensi pengelola melalui pelatihan akuntansi yang relevan, optimalisasi sistem pengendalian internal, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pendamping desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini hanya akan mengkaji tiga variabel utama, yaitu latar belakang pendidikan, sistem pengendalian internal, dan pelatihan akuntansi, yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga ruang lingkup penelitian tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pertama, penelitian ini membatasi variabel latar belakang pendidikan pada pengelola BUMDes yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, dengan mempertimbangkan apakah pendidikan formal mereka relevan dengan bidang akuntansi atau keuangan. Kedua, sistem pengendalian internal yang dikaji meliputi kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BUMDes untuk memastikan keakuratan laporan keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022. Ketiga, pelatihan akuntansi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup pelatihan teknis yang diterima oleh pengelola BUMDes, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun secara mandiri oleh BUMDes itu sendiri.

Penelitian ini juga dibatasi pada ruang lingkup geografis Kecamatan Seririt, yang dipilih karena merupakan kecamatan dengan jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Buleleng, yakni 20 unit BUMDes, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025).

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang pendidikan pegawai BUMDes berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt?
3. Apakah pelatihan akuntansi yang dilakukan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan pegawai BUMDes terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan yang dilakukan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, digunakan

sebagai referensi untuk penelitian serupa, dan memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan memberikan kontribusi baru dalam literatur akuntansi, penulis akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas sebagai seorang akademisi atau peneliti. Hasil penelitian yang dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi yang berharga akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap penulis.

b. Bagi Pegawai BUMDes

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pegawai BUMDes tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Mereka akan dapat memahami pentingnya tingkat pendidikan, sistem pengendalian internal, dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Menyediakan referensi empiris yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum dan program pelatihan bagi mahasiswa dan staf pengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang akuntansi pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelatihan. Dengan demikian, universitas dapat lebih efektif dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di lapangan.